

DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA MELALUI KERJASAMA INTELLIGENCE EXCHANGE GROUP (IEG) DI SELAT MALAKA

INDONESIAN DEFENCE DIPLOMACY BY INTELLIGENCE EXCHANGE GROUP (IEG) COOPERATION IN MALACCA STRAITS

Thomas HK. Sinaga¹

Program Studi Diplomasi Pertahanan

(apul_au97@yahoo.com)

Abstrak - Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas perdagangan dan transportasi internasional tersibuk di dunia melayani lebih dari sepertiga perdagangan global. Kondisi keamanan maritim nya secara geografis perlu mendapat perhatian serius. Gangguan keamanan maritim yang krusial di wilayah tersebut seperti pembajakan (*piracy*) dan perompakan bersenjata (*armed robbery*) serta penyelundupan senjata, mendorong upaya untuk meningkatkan pengamanan dan proaktif mengatasi segala macam gangguan di Selat Malaka yang berdampak terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia. Kondisi tersebut, perlu suatu kerjasama pertahanan dan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kerjasama IEG sebagai strategi dari diplomasi pertahanan dan instrumen kebijakan politik luar negeri untuk mewujudkan kepentingan nasional dan menjaga kedaulatan masing-masing negara yang berlangsung secara bilateral maupun multilateral. Dengan demikian, maka bagaimana kepentingan nasional Indonesia diwujudkan dalam kerjasama IEG dan bagaimana kontribusi kerjasama IEG terhadap upaya diplomasi pertahanan Indonesia merupakan pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap tiga informan yang meliputi praktisi dan pakar di bidang terkait dan dari berbagai literatur. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dengan teori dan konsep yang digunakan, yaitu teori kerjasama intelijen, konsep diplomasi pertahanan dan konsep kerjasama pertahanan. Hasil penelitian ini menunjukkan, diplomasi pertahanan Indonesia dalam kerjasama IEG merupakan wadah untuk menumbuhkan rasa saling percaya (CBMs) diantara negara anggota dan meningkatkan kapabilitas pertahanan (*defense capabilities*) tiap negara anggotanya serta dapat meningkatkan citra (*prestise*) bagi Indonesia di mata dunia internasional.

Kata Kunci: Selat Malaka, Diplomasi Pertahanan Indonesia, Intelligence Exchange Group, Kerjasama Pertahanan, Kerjasama Intelijen.

Abstract - Malacca Straits as a traffic line with international trade and transport busiest in the world's to serve over a third of global trade. Maritime security conditions of its geographical needs serious attention. Crucial maritime security threats in the region such as

¹ Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Pertahanan

piracy and armed robbery as well as the smuggling of arms, encouraging efforts to improve security and proactively address all kinds of trouble in Malacca Straits which have an impact on the sovereignty and territorial integrity of Indonesia. Under these conditions, the need for a defense cooperation and discussed in this study is a collaboration IEG as a strategy of defense diplomacy and foreign policy instruments to realize national interests and safeguard the sovereignty of each country which takes place bilateral and multilateral. Thus, it is how Indonesia's national interest was realized in IEG cooperation and how to contribute to defense diplomacy efforts Indonesia is a research question raised in this study. This study used descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews with three informants that includes practitioners and experts in related fields and from various literature. The analysis in this study was done by comparing the data obtained with used the one theories and two concepts, namely the theory of intelligence cooperation, the concept of defense diplomacy and defense cooperation concept. The results of this study indicate that, Indonesia defense diplomacy in IEG cooperation is a place to foster mutual trust (CBMs) among member countries and increase the capabilities of the defense (defense capabilities) each of the member states as well as to improve the image (prestige) for Indonesia in the world.

Keywords: Malacca Straits, Indonesia Defense Diplomacy, Intelligence Exchange Group, Defense Cooperation, Intelligence Cooperation.

Pendahuluan

Selat Malaka merupakan jalur laut yang digunakan sebagai lalu lintas perdagangan dan transportasi internasional. Selain itu, Selat Malaka juga merupakan salah satu jalur lintas laut yang tersibuk di dunia yang melayani lebih dari sepertiga perdagangan global². Oleh karena itu, kondisi keamanan wilayah maritim di sekitar Selat Malaka secara geografis merupakan salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian serius³.

Isu gangguan keamanan di laut yang sering terjadi di sekitar Selat Malaka

adalah pembajakan (*piracy*) dan perompakan bersenjata (*armed robbery*). Selain itu gangguan keamanan lain yang terjadi di Selat Malaka dan perairan di sekitarnya yang juga termasuk ancaman adalah penyelundupan senjata oleh kelompok separatis dan juga sebagai jalur pengiriman senjata kelompok teroris. Oleh karena itu, sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia merasa perlu dan akan selalu proaktif untuk mengatasi segala macam gangguan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴.

Dengan menonjolnya isu keamanan maritim terkait dengan fungsi

² Anak Agung Banyu Perwita, 2013. *Pengantar Kajian Strategis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

³ Parulian Simamora. (2013). *Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

⁴ Ibid.

wilayah tersebut yang semakin strategis bagi kepentingan negara-negara di dunia dan komunitas internasional, akan mendorong upaya untuk meningkatkan pengamanannya karena Selat Malaka sampai saat ini masih menjadi urat nadi utama interaksi ekonomi global sehingga keamanan maritim dapat dikatakan sebagai salah satu isu krusial bagi banyak negara di dunia⁵.

Oleh karena itu, tanggung jawab utama dalam penanganan mengatasi ancaman dan gangguan di wilayah Selat Malaka pada dasarnya berada di tangan negara-negara pantai (*littoral states*) seperti Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand yang dibantu oleh negara-negara pengguna (*user states*) Selat Malaka. Sehingga dengan melihat kondisi tersebut, maka diperlukan adanya suatu kerjasama pertahanan yang bertujuan untuk meningkatkan diplomasi pertahanan yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling percaya (*confidence building measures*) dan sebagai *technical assistance* di antara negara pantai (*littoral states*)⁶.

Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea / UNCLOS 1982*) pasal 34 ayat 1 yang menyebutkan:

*“The regime of passage through straits used for international navigation established in this Part shall not in other respects affect the legal status of the waters forming such straits or the exercise by the States bordering the straits of their sovereignty or jurisdiction over such waters and their air space, bed and subsoil”*⁷.

Pada pasal tersebut dikatakan dan ditegaskan bahwa di Selat Malaka berlaku rezim maritim khusus yang walaupun di Selat tersebut digunakan untuk pelayaran internasional namun pemilik kedaulatan Selat adalah ketiga negara pantai (*littoral states*) yang mengelilinginya yaitu Indonesia, Singapura dan Malaysia yang merupakan laut teritorial negara tersebut.

Lebih lanjut dalam UNCLOS 1982 pasal 43 juga menjelaskan bahwa, negara pengguna (*user states*) dan negara pantai (*littoral states*) harus bekerjasama dalam

⁵ Menhan. 2008. *Buku Putih Pertahanan*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.

⁶ Loc,cit.

⁷ United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS). 1982.

upaya peningkatan pengadaan dan pemeliharaan alat bantu navigasi dan keselamatan pelayaran di Selat Malaka dengan penjelasan pasal sebagai berikut:

“Navigational and safety aids and other improvements and the prevention, reduction and control of pollution. User states and states bordering a strait should by agreement cooperate: (a) in the establishment and maintenance in a strait of necessary navigational and safety aids or other improvements in aid of international navigation and (b) for the prevention, reduction and control of pollution from ships”⁸.

Kerjasama pertahanan di antara negara pantai (*littoral states*) dalam konteks pengamanan di Selat Malaka ini, dilakukan sebagai salah satu bentuk strategi diplomasi pertahanan yang merupakan salah satu komponen integral dari kebijakan politik luar negeri bidang pertahanan yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan nasional dan menjaga kedaulatan masing-masing

⁸ Ibid.

negara yang berlangsung secara bilateral maupun multilateral.

Hal tersebut secara teoritis juga senada dengan yang dikatakan oleh Idil Syawfi (2009) bahwa strategi diplomasi pertahanan suatu negara merupakan kolaborasi dari komponen diplomasi, pertahanan dan pembangunan industri. Namun secara parsial bahwa aktivitas diplomasi pertahanan suatu negara memiliki tiga karakteristik utama yaitu sebagai:

- a). *Defense diplomacy for confidence building measures (CBMs).*
- b). *Defense diplomacy for defense capabilities.*
- c). *Defense diplomacy for defense industry⁹.*

Menurut Amitav Acharya (2001), lebih lanjut dijelaskan bahwa *defense diplomacy for confidence building measures (CBMs)*, dilakukan untuk membangun hubungan yang baik dengan negara-negara lain, yang utamanya dilakukan untuk menurunkan ketegangan atau menghilangkan mispersepsi antar pihak dengan cara saling terbuka dalam kebijakannya, transparansi dalam pengembangan kapabilitas militernya

⁹ Idil Syawfi. 2009. *Aktivitas Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008)*. Jakarta: Universitas Indonesia.

sehingga anggapan bahwa apa yang dilakukan oleh suatu negara tidak dianggap sebagai ancaman bagi negara lain¹⁰.

Selanjutnya menurut Ron Matthews menjelaskan bahwa *defense diplomacy for defense capabilities*, dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat kapabilitas pertahanan negara secara material. Peningkatan kapabilitas pertahanan dapat dilakukan dalam tataran internal dan eksternal. Khusus dalam tataran eksternal, instrumen diplomasi perthanan memainkan peranan penting agar memungkinkan bagi sebuah negara untuk dapat melakukan pembelian senjata bagi kepentingan pengembangan kekuatan pertahanannya dari negara lain¹¹.

Salah satu bentuk kerjasama pertahanan yang dilakukan di Selat Malaka dan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kerjasama pertahanan dalam bentuk pertukaran intelijen atau *Intelligence Exchange Group* (IEG) sebagai lini pertama dalam diplomasi pertahanan yang dilakukan antara Indonesia, Malaysia dan Singapura sebagai negara pantai (*littoral states*) di sepanjang Selat Malaka.

Kerjasama pertahanan dalam bentuk kerjasama IEG ini dibentuk tahun 2006, merupakan salah satu komponen dari *Malacca Straits Sea Patrol* (MSSP) yang bertujuan mendukung patroli laut dan udara di atas Selat Malaka. IEG dibentuk karena sejak tahun 2002-2007 adanya anggapan dunia internasional bahwa Selat Malaka merupakan *the most dangerous water in the world* setelah Somalia. IEG berguna untuk membatasi peningkatan penyelundupan baik barang dan orang melalui pintu-pintu pelabuhan kecil antar negara.

Dalam menjalankan sebuah diplomasi pertahanan Indonesia, yang perlu diperhatikan dalam kerjasama IEG adalah bagaimana usaha menumbuhkan rasa saling percaya (CBMs) dan meningkatkan kapabilitas militer (*defense capabilities*) diantara negara pantai (*littoral states*) di Selat Malaka. Tentunya masih banyak keterbatasan yang harus dibenahi Indonesia selaku negara besar dan terluas di kawasan Selat Malaka terutama dalam hal menghindari campur tangan pihak asing diluar negara pantai untuk turut campur tangan dalam pengamanan Selat Malaka dan masih terbatasnya alat peralatan dan alutsista pendukung pertahanan serta diperlukan kualitas sumber daya manusia yang

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

handal dan mumpuni untuk bisa menjalankan koordinasi dan kerjasama khususnya kerjasama dalam IEG ini.

Lebih lanjut, Stanislaus Riyanta (2015) mengatakan bahwa adanya beberapa negara menjalin hubungan strategis dengan cara saling bertukar informasi dan analisis intelijen. Walaupun sering kali pertukaran informasi tersebut kurang berimbang tetapi dianggap tetap menguntungkan. Ungkapan *quid pro quo/what for what, Favor for a favor*/pertukaran yang adil dan seimbang digunakan oleh badan-badan intelijen untuk menggambarkan hubungan tersebut¹².

Hal tersebut dapat dihadapkan pada kenyataan bahwa hampir semua negara, khususnya tiga negara yang melakukan pengelolaan jalur laut bersama akan memiliki tantangan seperti kebijakan pemerintahan negara tetangga, perilaku kekuatan regional kawasan, peningkatan kekuatan militer oleh negara tetangga dan di kawasan serta masalah-

masalah keamanan kawasan yang akan mempengaruhi kepentingan nasional¹³.

Kerjasama pertahanan antara ketiga negara pantai (*littoral states*) melalui IEG di Selat Malaka bukan hanya sekedar kerjasama dalam pengamanan tetapi juga merupakan bentuk dari kegiatan diplomasi pertahanan. Hal ini merupakan potensi bagi ketiga negara tersebut untuk menciptakan *confidence building measures* (CBMs) dan *defense capability* dalam dinamika pengelolaan keamanan di Selat Malaka.

Pada dasarnya kerjasama intelijen antar negara itu merupakan sebuah kegiatan yang akan berimplikasi terhadap ketimpangan antara negara satu dengan lainnya namun dianggap tetap menguntungkan dan pada kenyataannya saat ini telah ada kerjasama intelijen dalam bentuk pertukaran informasi pada kerjasama IEG di Selat Malaka yang kemungkinan akan menimbulkan permasalahan bagi masing-masing negara. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kesalahpahaman informasi di antara negara yang terlibat kerjasama serta terciptanya suasana aman, damai dan sejahtera di wilayah

¹² Riyanta, S. (2015, July 16). *Kerjasama Intelijen Internasional*. Retrieved from jurnalintelijen.net verba volant scripta manent: <http://jurnalintelijen.net/2015/07/06/kerjasama-intelijen-internasional/>, diakses tanggal 10 Agustus 2016.

¹³ Edy Prasetyono. 2005. *Intelijen Pertahanan*. dalam A. Widjajanto, *Reformasi Intelijen Negara* (p. 84). Depok: PACIVIS FISIP-UI.

Selat Malaka, diperlukan diplomasi pertahanan Indonesia melalui kerjasama IEG di Selat Malaka untuk saling menjaga dan meningkatkan rasa saling percaya (*confidence building measures*) dan juga dapat meningkatkan *defense capability* bagi negara yang terlibat kerjasama serta stabilitas keamanan kawasan dapat terjaga dengan baik.

Metodologi

Desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Desain penelitian ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebuah upaya, cara atau konsep yang relevan dengan fenomena empiris yang terjadi secara alamiah. Sebagaimana dijelaskan oleh Martono (2015) bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kondisi sosial yang ada dengan cara menjelaskan seutuhnya dari sudut pandang interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah¹⁴.

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Informan yang termasuk di dalamnya pendapat para

akademisi, praktisi maupun pengambilan kebijakan (*decision maker*). Kemudian data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang di dalamnya terdiri dari buku, laporan penelitian, jurnal, artikel, surat kabar, laporan hasil seminar, penelitian tesis, majalah, media baik *online* maupun cetak¹⁵.

Pada penelitian ini, teknik analisis yang akan digunakan yaitu teknik analisis dari Miles & Huberman, (1994). Secara umum, proses analisis data kualitatif melibatkan empat proses, (Miles & Huberman, 1994) sebagai berikut: (I) reduksi data; yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan interpretasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika melakukan penelitian di lapangan maupun studi pustaka. (II) *display* atau penyajian data; yaitu penyajian data dalam bentuk kata-kata, kalimat, gambar, simbol, skema, bagan, grafik, tabel dan matriks. (III) verifikasi data; yaitu merupakan aktivitas merumuskan kesimpulan. Adapun teori dan konsep yang digunakan sebagai alat analisa adalah teori kerjasama intelijen, konsep diplomasi pertahanan, dan konsep kerjasama pertahanan.

¹⁴ Martono, N. 2015. *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta : PT Grafindo Persada.

¹⁵ Ibid.

Pembahasan

IEG Dalam Perspektif Kerjasama Intelijen Internasional

Menurut Bjorn Fagersten (2012) dalam teorinya tentang kerjasama intelijen mengatakan bahwa ada empat kepentingan utama (dasar) dimana negara-negara membangun dan mengembangkan kerjasama intelijen multilateral yaitu berdasarkan: keuntungan intelijen, keuntungan kebijakan, menjaga kedaulatan dan mengurangi resiko¹⁶. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan Letkol Laut (S) Ariyan Dilli Louhenapessy (wawancara 22 November 2016) yang mengatakan bahwa:

“Keuntungan intelijen yang diperoleh dalam kerjasama IEG ini adalah dapat mengetahui modus operandi, tipikal perompak dan senjata yang dibawa untuk selanjutnya dilakukan *sharing perspektif* terkait apa yang ditemukan di wilayah masing-masing. Hal ini sebagai salah satu bentuk *shuttle defense diplomacy*

dalam IEG”.

Hal ini juga di dukung oleh Brigjen TNI Andjar Wiratma (wawancara 1 Desember 2016) yang mengatakan bahwa:

“Terkait keuntungan dari kebijakan pertahanan dari kerjasama IEG adalah adanya komunikasi internasional dalam bentuk *shuttle defense diplomacy* dimana ada upaya dari tiap-tiap negara memiliki kesamaan kepentingan (*common interest*) untuk melaksanakan pengamanan maritim sesuai dengan tuntutan UNCLOS dimana Indonesia yang juga menggunakan dan meratifikasi UNCLOS termasuk keempat negara lainnya namun perlu diingat bahwa kerjasama ini bukan kerjasama ASEAN tetapi kerjasama multilateral di Selat Malaka”.

Kerjasama intelijen dalam IEG ini juga dikatakan dapat menjaga kedaulatan negara masing-masing anggota karena dalam pelaksanaan kerjasama ini sudah dibagi lingkup tugas pengamanannya sesuai wilayah teritori masing-masing negara dengan menggunakan unsur

¹⁶ Bjorn Fagersten. 2012. Multilateral Intelligence Cooperation: A Theoretical Framework. In B. Fagersten, *Multilateral Intelligence Cooperation: A Theoretical Framework* (p. 1). US: Kennedy School of Government Harvard University.

masing-masing negara pada waktu yang sama. Secara tidak langsung sebenarnya negara tetangga di Selat Malaka sudah mengakui secara aklamasi terhadap kedaulatan Indonesia walaupun di Sektor 3 antara perbatasan Indonesia dengan Malaysia permasalahannya masih belum selesai dan sampai saat ini pihak Malaysia belum mau duduk bersama mendiskusikan masalah tersebut. Lebih lanjut dikatakan oleh Kolonel Laut (E) Angkasa Dipua (wawancara 21 November 2016), yang menambahkan bahwa:

“Kerjasama IEG ini juga dapat mengurangi resiko dari kebocoran informasi karena yang di *sharing* hanya modus operandi, cara operasional dan metode-metode yang dilakukan oleh perompak karena IEG sistemnya seperti *hit and run (seek and run)* mencari dan menemukan, berarti menguraikan apa yang sedang dihadapkan tersebut sehingga tidak ditemukan resiko dari kebocoran informasi”.

Selain itu, Fagersten juga mengatakan bahwa dalam suatu kerjasama intelijen, dapat dilihat sejauh mana tingkat (*level*) kualitas

kerjasamanya. Fagersten mengatakan bahwa kualitas kerjasama intelijen akan semakin meningkat apabila dipengaruhi oleh dua dimensi penting. *Pertama*, densitas atau tingkat ke-detail-an suatu pertukaran informasi. *Kedua*, cakupan, lingkup atau intensitas dari pertukaran informasi intelijen. Peningkatan terhadap dua faktor tersebut akan berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya level kerjasama intelijen antar para pihak¹⁷.

Tujuan dari kerjasama IEG adalah sebatas untuk pertukaran informasi, pelaksanaannya dapat dilaksanakan di Indonesia namun dapat juga dilaksanakan di *resiprokal* negara yang bersangkutan tetapi Indonesia tidak menganut sistem tersebut sehingga Indonesia sebatas-batasnya intelijen adalah hanya *point of contact, sharing perspektif* dalam pertemuan-pertemuan. Oleh karena itu, dalam kerjasama IEG ini sudah tepat wadahnya untuk melaksanakan *sharing perspektif* karena setiap negara melaporkan per periode apa yang ditemukan, kendalanya apa dan penyebabnya apa.

Kerjasama intelijen dalam IEG ini pada kenyataannya dapat mewadahi seluruh teori yang dikatakan Fagersten dimana negara-negara yang membangun

¹⁷ Ibid.

dan mengembangkan kerjasama intelijen multilateral harus berdasarkan beberapa pertimbangan yang akan diperoleh terutama aspek keuntungannya yaitu keuntungan intelijen, keuntungan kebijakan, keuntungan dalam menjaga kedaulatan dan keuntungan dalam resiko kebocoran informasi masih dapat diminimalisir.

Namun dilihat dari tingkat (*level*) kerjasamanya, IEG ini masih pada level dasar (bawah) terbukti bahwa tujuan dari kerjasama IEG ini hanya sebatas untuk pertukaran informasi saja, hanya *point of contact* dan *sharing perspektif* dalam pertemuan-pertemuan karena setiap negara hanya melaporkan per periode apa yang ditemukan terkait modus operandi, tipikal perompak dan senjata yang di bawa, metode-metode yang digunakan termasuk kendala dan penyebabnya. Kegiatan pertukaran informasi dalam IEG adalah dengan menguraikan informasi yang sedang terjadi dan sedang dihadapkan sehingga mengurangi tingkat kebocoran informasi.

Selain itu, kerjasama dalam IEG ini juga dapat dikatakan sebagai kerjasama di bidang pertahanan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang dikembangkan sebagai salah satu instrumen atau strategi diplomasi

pertahanan dari kebijakan politik luar negeri dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional masing-masing negara yang berlangsung secara bilateral maupun multilateral.

Implikasi Strategis Kerjasama IEG Terhadap Indonesia Dalam Mengamankan Selat Malaka

Adapun dalam kerjasama IEG tentunya memiliki dampak positif dan negatif bagi pihak Indonesia. Dampak positif yang terlihat adalah sebagai berikut:

- a). Kerjasama IEG dapat meningkatkan kemampuan dan kapabilitas militer pertahanan Indonesia.
- b). Dalam IEG dapat mengurangi konflik antar negara anggota maupun negara non-anggota, meskipun hal ini tidak berarti tidak ada konflik. Pertukaran Informasi dalam IEG diharapkan mampu lebih memperkuat informasi antara negara anggota.
- c). Kerjasama IEG dapat menjaga kedaulatan wilayah Indonesia dengan mempromosikan stabilitas lingkungan internasional yang lebih kooperatif dan stabil serta

merubah pandangan dunia terhadap wilayah laut Selat Malaka yang di anggap sebagai perairan berbahaya.

Sementara dampak negatif yang muncul dari kerjasama IEG adalah dikarenakan Singapura sebagai negara Interkom yang mempunyai teknologi dalam pengolahan informasi, maka hal ini akan berdampak terhadap ketergantungan Indonesia dalam pengolahan informasi sehingga menyebabkan *bargaining power* dalam diplomasi pertahanan Indonesia tidak maksimal.

Dari dampak-dampak yang muncul di atas yang menjadi tantangan bagi Indonesia adalah bagaimana menciptakan dan membekali personel di lapangan dengan teknologi yang mumpuni, sehingga hal ini akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap Singapura. Hal inilah yang seharusnya menjadi fokus pemikiran apabila ingin menciptakan tidak hanya lingkungan stabilitas wilayah Selat Malaka, namun juga agar kerjasama IEG dapat memberikan *bargaining power* bagi diplomasi pertahanan Indonesia.

IEG Sebagai Upaya Diplomasi Pertahanan Indonesia

Dalam pemanfaatan kerjasama IEG sebagai diplomasi pertahanan, IEG telah menjalin komunikasi dengan negara-negara sahabat, lebih jauh mengurangi resiko terhadap keamanan wilayah laut Indonesia. Berkaitan dengan diplomasi pertahanan, bahwa konsep kerjasama IEG ini adalah sebagai wadah diplomasi pertahanan bagi negara-negara anggotanya untuk melaksanakan kerjasama pada bidang pertahanan dan keamanan melalui pertukaran informasi intelijen. Dalam penjelasannya, Prasetyono (2005) mengatakan bahwa terdapat beberapa hal terkait intelijen pertahanan, diantaranya yaitu:

- a). Intelijen pertahanan memberikan peringatan dini (*early warning*). Esensi dari intelijen pertahanan adalah peringatan dini atas dasar analisa informasi yang telah diperoleh. Analisa mencakup perkembangan lingkungan strategis, misalnya tentang potensi serangan teroris, potensi konflik, pemberontakan, kemungkinan pelanggaran wilayah, dan ancaman-ancaman dari kekuatan eksternal dan sebagainya.

- b). Intelijen pertahanan memberikan penilaian tentang berbagai isu yang berkembang, kecenderungan strategis ke depan baik pada tingkat regional maupun global, perkembangan teknologi dan kemampuan negara lain. Atas dasar ini intelijen pertahanan melakukan identifikasi tentang kemungkinan ancaman terhadap kepentingan nasional di bidang pertahanan.
- c). Intelijen pertahanan membantu pelaksanaan operasi dengan tujuan utama meminimalkan korban dan menyiapkan kebutuhan untuk keberhasilan suatu operasi militer. Intelijen pertahanan memberikan bantuan berupa perencanaan operasi, baik pada tingkat strategis maupun taktis-operasional.
- d). Intelijen pertahanan sangat penting dalam mendukung program pengembangan kekuatan pertahanan. Hal ini dilakukan dengan analisa terhadap kemampuan militer di kawasan, analisa kekuatan infrastruktur dan teknologi kekuatan militer negara lain. Informasi dan analisa tersebut

menjadi dasar bagi penilaian kemampuan kekuatan pertahanan nasional dan kebijakan pengembangan kekuatan pertahanan.

Berdasarkan keempat penjelasan beserta data yang telah di analisis diatas, bahwa intelijen dalam kerjasama IEG memiliki peranan yang sangat penting untuk melaksanakan pencarian informasi guna mendukung operasi. Namun meskipun begitu, pengumpulan informasi intelijen pertahanan pasti akan menutup informasi yang dianggap sensitif bagi kepentingan keamanan atau pertahanan negara masing-masing anggota. Perkembangan dunia internasional mengharuskan berkembangnya diplomasi pertahanan sebagai lini pertama pertahanan, menempatkan diplomasi pertahanan sebagai bagian integral dari kegiatan intelijen pertahanan.

IEG Sebagai Mekanisme *Confidence Building Measures* Indonesia Dengan *Littoral States*

Dalam diplomasi pertahanan suatu negara harus memiliki suatu *bargaining power* agar tujuan dan kepentingan nasional negara tersebut dapat diperoleh. Diplomasi pertahanan erat kaitannya dalam mempertahankan

stabilitas keamanan kawasan, dalam hal ini kawasan jalur laut Selat Malaka. Pada saat ini diplomasi pertahanan di kawasan Asia Tenggara terus meningkat. Negara-negara di kawasan terus memperkuat kinerja dari diplomasi pertahanan masing-masing negaranya dengan negara-negara lain dalam berbagai bentuk kerjasama, baik secara bilateral maupun multilateral. Bahkan negara-negara di luar Asia Tenggara pun juga ikut berperan guna memperkuat diplomasi pertahanannya di kawasan Asia Tenggara. Diplomasi Pertahanan ditujukan untuk saling meningkatkan *Confidence Building Measures* (CBM) dan sekaligus memperkuat stabilitas kawasan¹⁸.

Dalam pelaksanaan kerjasama IEG di Selat Malaka ini, agar terjalin kerjasama antar negara anggota yang lebih baik lagi, maka dibutuhkan peningkatan rasa saling percaya (CBMs) sehingga dapat terjalinnya rasa saling percaya (CBMs) antar negara. Dari kerjasama IEG ini tidak dapat dipungkiri adanya konflik antar negara anggota ataupun dengan negara diluar anggota. Dibentuknya IEG ini, salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat

frekuensi dan mencegah terjadinya konflik antar negara anggota. Kerjasama IEG menjembatani konflik tersebut dengan kesepakatan yang termuat dalam perjanjian yang telah disetujui oleh negara anggota. Kesamaan *perspektif* yang telah disepakati negara anggota akan memberikan komunikasi yang efektif sehingga dapat mencegah atau mengurangi konflik yang ada sehingga dapat menumbuhkan rasa saling percaya (CBMs) antar negara anggota dalam kerjasama IEG.

Selain itu, kerjasama dalam IEG ini dapat dikatakan menguntungkan bagi semua negara anggotanya. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara anggota juga mempunyai kepentingan masing-masing, sebagai contoh kepentingan Indonesia dalam kerjasama IEG ini adalah untuk menjaga hubungan keharmonisan antar negara anggota, menjaga kedaulatan serta menciptakan kondisi keamanan wilayah Indonesia pada Selat Malaka. Namun tentunya yang harus diwaspadai adalah adanya kepentingan nasional masing-masing negara yang bersifat khusus yang dapat merugikan Indonesia baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini kemungkinan bisa terjadi mengingat dalam perairan Selat Malaka, Indonesia yang terdapat banyak sumber

¹⁸ Salim. 2013. Peningkatan Kerjasama Pertahanan Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara Guna Mendukung Diplomasi Pertahanan Dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Kawasan. *Raja Samudera*.

daya alamnya serta sebagai urat nadi dari jalur pelayaran.

Dalam kerjasama IEG, baik secara langsung maupun tidak langsung akan dapat memiliki pengaruh terhadap diplomasi pertahanan suatu negara. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada konsep kerjasama IEG tidak hanya aspek kekuatan militer saja yang diperhitungkan, namun juga aspek teknologi dimana apabila kesemua aspek ini dimiliki oleh suatu negara maka hal ini akan menjadikan diplomasi pertahanan yang kuat bagi negara tersebut. Dengan dilatarbelakangi kekuatan militer yang besar dan penguasaan teknologi dan informasi yang baik maka akan mudah bagi negara tersebut melakukan dominasi suatu wilayah, dalam hal ini secara khusus adalah dominasi wilayah Selat Malaka demi agenda khusus negara tersebut yang dapat berupa aspek ekonomi, politik, dan kedaulatan.

Salah satu keuntungan yang dapat diperoleh Indonesia dalam kerjasama IEG ini adalah terjalinnya komunikasi internasional antara negara-negara yang memiliki tanggung jawab dalam pengamanan Jalur Selat Malaka. Komunikasi ini penting adanya untuk menjalin koordinasi yang baik antara operasi pengamanan yang

diselenggarakan berbagai negara, mengingat negara-negara tersebut mempunyai waktu dan area yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Hal ini juga yang disampaikan oleh Brigjen TNI Andjar Wiratma (dalam wawancara sesi jawab pertanyaan penulis pada 1 Desember 2016) bahwa:

“Kerjasama IEG juga dapat membantu dalam mempromosikan lingkungan internasional yang lebih kooperatif dan stabil. Dikatakan bahwa IEG mengakui dan ikut menjaga kestabilan keamanan kawasan dan internasional melalui kerjasama yang telah disepakati bersama. Dalam kerangka-kerangka hukum internasional itu berarti Indonesia harus sepakat dan komitmen untuk mematuhi mekanisme yang ada, salah satunya dengan melaksanakan keamanan maritim”.

Sesuai dengan peraturan yang telah dimuat dalam UNCLOS yaitu kewajiban dan tanggung jawab negara pantai dalam memberikan pengamanan wilayah antara lain memberikan alur, memberikan rasa aman, menggelar

aparatus keamanan di laut teritorial, menyelesaikan permasalahan batas-batas maritim, menyediakan ruang udara di atas ALKI dan sebagainya. Maka peranan kerjasama IEG dalam hal ini *sharing* informasi antara negara dalam wilayah Selat Malaka, sangat penting adanya. Tentunya dalam melaksanakan amanat yang tertera dalam UNCLOS tidak dapat dilakukan oleh hanya satu negara saja karena di dalam Selat Malaka terdapat beberapa negara yang memiliki perairan laut tersebut. Negara-negara yang memiliki peranan dalam Selat Malaka yang tergabung dalam kerjasama IEG ini mengurai dan memecah cara penyelesaian yang efektif, ternyata salah satunya seperti Singapura membentuk IFC, menjembatani ketidakmampuan dari negara-negara pantai masalah *sharing informasi* dan *intelligence* melalui Elint (Elektronika Intelijen).

Kerjasama IEG dalam hal ini adalah sebagai wadah bagi negara-negara yang memiliki tanggungjawab di Selat Malaka, tentunya dalam *sharing* informasi dalam IEG akan memberikan pengaruh besar dalam mempromosikan lingkungan yang kooperatif dan stabil di dalam kawasan Selat Malaka kepada dunia internasional. Kerjasama IEG menjadi salah satu terobosan bagi negara-negara

pantai yang memiliki tanggung jawab dan tugas dalam pengamanan wilayah Selat Malaka. Dengan dibentuknya kerjasama IEG ini, maka dunia internasional akan melihat kemampuan negara-negara pantai yang bertanggung jawab memberikan pengamanan di Selat Malaka.

Kontribusi IEG Dalam Meningkatkan Kapabilitas Pertahanan Indonesia

Kerjasama IEG tentunya memang mendukung diplomasi pertahanan Indonesia karena dengan adanya kerjasama IEG akan mempromosikan stabilitas keamanan wilayah, kemampuan militer pihak Indonesia serta akan mereduksi konflik dengan negara anggota maupun negara non-anggota. Namun pada kenyataannya dalam kerjasama IEG ini pihak Indonesia dalam aspek teknologi masih bergantung kepada negara Singapura sebagai negara interkom. Penguasaan teknologi dalam hal kerjasama ini merupakan hal penting yang harus dikuasai oleh suatu negara, seperti halnya Singapura. Singapura memiliki teknologi dimana negara anggota yang tergabung dalam IEG bergantung kepada Singapura karena seluruh jalur informasi yang diolah selanjutnya dijadikan petunjuk bagi pelaksanaan operasi pengamanan

wilayah Selat Malaka yang dihimpun IFC Singapura, hal inilah yang tentunya menjadikan *bargaining power* diplomasi pertahanan pihak Singapura relatif kuat. Untuk Indonesia seharusnya hal ini membuat pihak Indonesia semakin terpacu agar dari pihak Indonesia sendiri membekali personel di lapangan dengan teknologi yang mumpuni, hal ini sebagai pelengkap dari kekuatan militer Indonesia yang bertujuan agar diplomasi pertahanan Indonesia dalam kerjasama IEG ini mempunyai *bargaining power* yang lebih kuat.

Kerjasama IEG tentunya dapat dijadikan sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan militer Indonesia, dimana kemampuan militer tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur dalam kemampuan pertahanan suatu negara. Pentingnya kerjasama IEG dalam meningkatkan kapabilitas militer, bahwa dengan adanya ILO di IFC Singapura, berarti Indonesia mengirimkan kesana. Ini menunjukkan ada keinginan Indonesia juga membuat Puskodal yang lebih baik, *ter- interoperability*.

Kerjasama dalam IEG ini adalah pertukaran informasi serta sebagai *sharing perspektif* diantara negara anggota melalui kegiatan intelijen. Dalam

IEG, informasi-informasi yang telah didapat oleh intelijen dari negara anggota kemudian dikumpulkan dalam IFC melalui perangkat lunak yang teknologinya dimiliki oleh pihak Singapura sebagai negara interkom. Kemudian yang bergerak adalah WFQR. Singapura sebagai negara yang tidak hanya memiliki kekuatan militer yang kuat namun juga mempunyai teknologi yang mumpuni tentunya memiliki *bargaining power* yang kuat dalam kerjasama IEG ini.

Meskipun terjadi hal seperti yang dijelaskan diatas terdapat beberapa keuntungan bagi Indonesia. Keuntungan tersebut antara lain adalah terbentuknya unit reaksi cepat WFQR yang merupakan gabungan intelijen, operasi, logistik, Pomal dan Diskum dengan mengedepankan fungsi intelijen untuk melaksanakan penjejak, pengejaran dan identifikasi terhadap pelaku tindak kejahatan di Selat Malaka karena pembajakan dan perompakan di skenario kan di darat, diimplementasikan di laut tapi pelakunya lari ke darat. Sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia lebih banyak melakukan operasi daripada Singapura, hal ini tentunya dapat dikatakan akan menjadi suatu keuntungan bagi Indonesia yaitu dapat meningkatkan kapabilitas militer yang

dimiliki oleh Indonesia.

Namun yang menjadi kendala mendasar dalam hal ini bagi Indonesia adalah ketergantungan dalam pengolahan data informasi yang telah dihimpun. Pengolahan data intelijen yang telah didapat tentunya membutuhkan teknologi yang canggih dimana teknologi ini hanya dimiliki oleh Singapura. Hal ini menguntungkan Singapura sebagai negara interkom, sehingga segala informasi mengenai keadaan Selat Malaka, pihak Singapura akan mengetahui dan ini merupakan keuntungan tersendiri bagi Singapura.

Keuntungan lainnya yang dapat diperoleh Indonesia dalam Kerjasama IEG ini adalah bahwa peranan IEG tidak hanya sebagai wadah organisasi saja, namun IEG juga dapat meningkatkan kemampuan daripada kapabilitas militer Indonesia melalui pengiriman personel militer Indonesia dalam hal pelaksanaan operasi pengamanan Selat Malaka. Kerjasama IEG ini secara tidak langsung dapat menjadi pemacu negara-negara anggota untuk berlomba-lomba dalam meningkatkan kapabilitas militernya masing-masing termasuk Indonesia serta untuk menepis anggapan dunia bahwa jalur laut Indonesia pada Selat Malaka tidak menjadi salah satu area yang berbahaya.

Peningkatan kemampuan militer dalam kerjasama IEG bagi Indonesia ini adalah dengan ditingkatkannya Puskodal setingkat Kohanudnas versi maritim dimana seorang Panglima dapat memerintah dalam satu peta dan tersaji seluruh data-data dalam satu layar yang disebut dengan istilah K4IPP. Dalam kerjasama IEG ini, tentunya kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh. Dalam (wawancara pada 21 November 2016), Kolonel Laut (E) Angkasa Dipua menyampaikan:

“Bahwa kualitas personel intelijen dari Indonesia dalam pelaksanaan IEG sudah profesional, namun tetap harus ditingkatkan. Saat ini personel yang dikirimkan sudah *capable* semua. Perlu diketahui, bahwa yang dibutuhkan adalah seorang personel intelijen yang berwawasan luas, minimal mempunyai penugasan luar negeri, berinteraksi dengan luar negeri. Sehingga ada keterbukaan wawasan dan berinteraksi dalam wadah kerjasama internasional. Oleh karena itu, *the right man in the right place* sangat perlu diperhatikan yang punya komitmen, kesinambungan dan simultan”.

Namun, di sisi lain kualitas sarana prasarana pendukung IEG yang berada di Batam saja kemampuannya masih sepertiga. Kemampuan kita

untuk lingkup radar masih jauh dari yang diharapkan, untuk meng cover sebatas pulau Batam saja tidak bisa sementara Singapura sudah menggunakan radar satelit yang cakupannya sampai Laut Sulu dan Laut Jawa.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ini kualitas SDM personel intelijen Indonesia yang dikirim dalam mewakili kerjasama IEG kesemuanya adalah yang *capable*, dalam arti bahwa kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia pada saat ini sudah mumpuni dalam bidangnya, namun permasalahannya kembali lagi pada teknologi yang dimiliki. Sumber daya manusia yang mumpuni bila tidak dibekali dengan kemampuan teknologi yang sesuai tidak dapat maksimal dalam pelaksanaannya, karena saat ini dalam kerjasama IEG pihak Indonesia masih bergantung kepada Singapura.

Kerjasama IEG pada kenyataannya dapat meningkatkan kemampuan dan kapabilitas militer Indonesia dimana pentingnya kemampuan militer Indonesia dalam IEG menjadi pendukung dalam upaya diplomasi pertahanan. Dalam melaksanakan diplomasi pertahanan tentunya suatu negara harus mempunyai

suatu nilai tawar tersendiri (*bargaining position*). Dalam kerjasama IEG inilah sebagai wadah untuk menunjukkan kapabilitas militer dan intelijen dimata dunia internasional. Namun sebagai negara yang tergabung dalam kerjasama IEG, Indonesia saat ini belum memiliki teknologi modern yang maksimal dalam mengolah informasi. Informasi dalam kerjasama IEG selama ini hanya ditangani oleh Singapura sebagai negara Interkom. Dengan memiliki teknologi yang modern maka secara tidak langsung akan meningkatkan *bargaining power* suatu negara dalam melaksanakan diplomasi pertahanannya.

Kontribusi IEG Terhadap Prestise International Indonesia Di Mata Internasional

Selat Malaka yang terletak di antara celah sempit antara Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand terdapat banyak isu mengenai keamanan dan stabilitas wilayah, dimana pada jalur laut wilayah Selat Malaka ini rawan terjadi perompakan, percobaan perompakan, pencurian dan terorisme laut. Ditambah lagi dimata dunia, jalur laut ini termasuk jalur laut yang berbahaya di dunia. Hal ini tentunya memberikan tantangan tersendiri bagi Indonesia agar dimata

dunia dapat menampik anggapan bahwa jalur wilayah Selat Malaka meskipun berbahaya tetapi pihak Indonesia masih lebih dari sanggup untuk menciptakan stabilitas keamanan kawasan di wilayah Selat Malaka.

Kerjasama IEG ini penting adanya untuk mengakomodir operasi keamanan laut dalam mengatasi aksi pembajakan dan perompakan (*piracy and sea robbery*) yang dilaksanakan oleh Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand sebagai negara pantai (*littoral states*). IEG lebih memfokuskan kepada pertukaran informasi mengenai situasi dan kondisi perompak yang terjadi dalam wilayah Selat Malaka. Kepentingan Indonesia dalam kerjasama IEG ini adalah untuk menurunkan citra (*prestise*) negatif dunia internasional bahwa perairan Selat Malaka pada wilayah Indonesia yang mendapatkan status sebagai perairan paling berbahaya setelah Somalia. Oleh karena itu, dengan ikut berperan aktifnya angkatan bersenjata Indonesia dalam rangka kerjasama intelijen ini adalah untuk membuktikan bahwa angkatan bersenjata Indonesia mampu untuk menangani segala jenis bentuk ancaman serta ikut menjaga stabilitas keamanan kawasan di wilayah Selat Malaka.

Hal ini senada dengan yang dikatakan

Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat Laksamana Pertama TNI Achmad Taufiqurrochman yang menyatakan bahwa Selat Malaka tidak lagi dapat disamakan dengan perairan Somalia di Afrika yang rawan perompakan. Angka kejahatan menurun hingga 70 persen setelah triwulan pertama tahun 2015. Penurunan tingkat kejahatan di Selat Malaka karena adanya kerjasama antara Angkatan Laut Indonesia, Singapura, Malaysia dan Thailand. Keempat angkatan ini secara rutin menggelar operasi patroli di selat yang menjadi salah satu jembatan perdagangan global tersebut. Operasi ini mencakup program kerjasama EIS dan IEG¹⁹.

Lebih lanjut, Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat Laksamana Muda TNI Achmad Taufiqurrochman menjelaskan bahwa angka kriminalitas di perairan Selat Malaka menurun karena terus dilakukan operasi penertiban di daerah Selat Malaka. Penurunan angka kriminalitas ini sejak Koarmabar mengamankan sebanyak 76 pelaku kejahatan yang melaksanakan aksinya di Selat Malaka. Hal ini adalah upaya untuk

¹⁹ CNN Indonesia. 2015. <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151023180100-20-86949/tni-al-selat-malaka-tak-lagi-berstatus-paling-berbahaya/>. Diakses tanggal 1 Februari 2017.

mewujudkan perairan Selat Malaka tetap dalam keadaan aman, tertib dan tidak ada lagi kejahatan yang merugikan kapal-kapal berlayar karena adanya anggapan beberapa negara asing yang menilai bahwa kawasan Selat Malaka adalah daerah yang rawan kejahatan²⁰ (Munawar, 2016).

Secara tidak langsung kerjasama IEG berkontribusi terhadap penurunan angka aksi kejahatan di Selat Malaka. Diplomasi pertahanan Indonesia dalam kerjasama IEG di Selat Malaka dapat menciptakan rasa saling percaya (CBMs) dimana dengan adanya pertukaran intelijen diantara negara pantai, dapat terjalannya transparansi informasi dan juga kerjasama IEG ini sebagai wadah komunikasi antar negara pantai. Sedangkan dalam pengembangan kapabilitas militer (*defense capabilities*) dalam kerjasama IEG ini, dapat menjadi ajang dalam pengembangan modernisasi peralatan militer khususnya intelijen seperti modernisasi dalam peningkatan *electronic* dan *signal intelligence*, terjalannya interoperabilitas internasional Indonesia dan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya

personel Intelijen. Selain itu kerjasama IEG ini juga sebagai wadah dalam mengembalikan citra (*prestise*) negatif dunia internasional terhadap Indonesia dimana dengan adanya kerjasama IEG ini, Indonesia mampu dalam menjaga dan juga dapat mempromosikan stabilitas keamanan wilayah di Selat Malaka yang selama ini adanya pandangan negatif terhadap Selat Malaka karena termasuk Selat berbahaya setelah Somalia.

Kesimpulan

Tingkat (*level*) kerjasama IEG ini masih dasar (*bawah*) karena hanya sebatas untuk pertukaran informasi saja, hanya *point of contact* dalam pertemuan-pertemuan dan *sharing perspektif* sebagai bentuk *shuttle defense diplomacy* untuk kepentingan bersama (*common interest*) dalam pengamanan maritim sesuai dengan tuntutan UNCLOS karena setiap negara hanya melaporkan per periode apa yang ditemukan terkait modus operandi, tipikal perompak dan senjata yang di bawa, metode baik taktik dan teknik yang digunakan termasuk kendala dan penyebabnya. Selain itu, kerjasama IEG ini sifatnya hanya melaksanakan patkor untuk mengakomodir operasi keamanan laut dan udara dalam mengatasi aksi pembajakan dan perompakan bersenjata (*piracy and sea*

²⁰ Munawar. 2016.

<http://www.antarasumut.com/berita/156375/kriminalitas-di-selat-malaka-menurun>. Diakses tanggal 5 Februari 2017.

robbery) sebagai negara pantai (*littoral states*) dengan area tanggungjawab pengamanan di wilayah teritorial masing-masing dan menggunakan unsur masing-masing pada waktu yang sama sehingga diantara negara anggota secara tidak langsung sudah saling menjaga kedaulatan masing-masing dan secara tidak langsung juga sudah ada pengakuan secara aklamasi terhadap kedaulatan masing-masing negara. Kerjasama IEG tentunya juga memiliki dampak positif dan negatif bagi pihak Indonesia. Dampak positif yang terlihat yang perlu dipertimbangkan Indonesia adalah:

- 1) Kerjasama IEG dapat meningkatkan kemampuan dan kapabilitas militer pertahanan Indonesia.
- 2) Dalam IEG dapat mengurangi konflik antar negara anggota maupun negara non-anggota, meskipun hal ini tidak berarti tidak ada konflik. Pertukaran Informasi dalam IEG diharapkan mampu lebih memperkuat informasi antara negara anggota.
- 3) Kerjasama IEG dapat menjaga kedaulatan

wilayah Indonesia dengan mempromosikan stabilitas lingkungan internasional yang lebih koopertif dan stabil serta merubah pandangan dunia terhadap wilayah laut Selat Malaka yang di anggap sebagai perairan berbahaya.

- 4) Dampak negatif yang muncul dari kerjasama IEG adalah ketergantungan Indonesia dalam pengolahan informasi sehingga menyebabkan *bargaining power* dalam diplomasi pertahanan Indonesia tidak maksimal karena Singapura sebagai negara Interkom mempunyai teknologi dalam pengolahan informasi.

Intelijen dalam kerjasama IEG memiliki peranan yang sangat penting untuk melaksanakan pencarian informasi guna mendukung operasi. Namun, pengumpulan informasi intelijen pertahanan pasti akan menutup informasi yang dianggap sensitif bagi kepentingan keamanan atau pertahanan negara masing-masing anggota. Perkembangan

dunia internasional mengharuskan berkembangnya diplomasi pertahanan suatu negara sebagai lini pertama pertahanan, menempatkan diplomasi pertahanan sebagai bagian integral dari kegiatan intelijen pertahanan.

Dalam pelaksanaan kerjasama IEG ini, agar terjalin kerjasama antar negara anggota yang lebih baik lagi, dibutuhkan rasa saling percaya (CBMs) diantara negara anggota, dimana tidak dapat dipungkiri konflik antar negara anggota ataupun dengan negara diluar anggota pasti tetap ada. Sehingga, salah satu tujuan di bentuk kerjasama ini adalah untuk mengurangi tingkat frekuensi dan mencegah terjadinya konflik antar negara anggota. Kerjasama IEG menjembatani konflik tersebut dengan kesepahaman yang termuat dalam perjanjian yang telah disetujui oleh negara anggota. Kesamaan *perspektif* yang telah disepakati negara anggota akan memberikan komunikasi yang efektif sehingga dapat mencegah atau mengurangi konflik yang ada.

Kerjasama IEG pada kenyataannya dapat meningkatkan kemampuan dan kapabilitas militer Indonesia dimana pentingnya kemampuan militer dalam IEG menjadi pendukung dalam diplomasi pertahanan. Dalam melaksanakan diplomasi

pertahanan, suatu negara harus mempunyai suatu nilai tawar tersendiri (*bargaining position*). Dalam kerjasama IEG inilah sebagai wadah untuk menunjukkan kapabilitas militer dan intelijen dimata dunia internasional. Dengan memiliki teknologi yang modern, secara tidak langsung akan meningkatkan *bargaining power* suatu negara dalam melaksanakan diplomasi pertahanannya.

Kepentingan Indonesia dalam kerjasama IEG ini adalah untuk menurunkan citra (*prestise*) negatif dunia internasional bahwa perairan Selat Malaka pada wilayah Indonesia yang mendapatkan status sebagai perairan paling berbahaya setelah Somalia. Oleh karena itu, dengan ikut berperan aktifnya angkatan bersenjata Indonesia dalam rangka kerjasama intelijen ini adalah untuk membuktikan bahwa angkatan bersenjata Indonesia mampu untuk menangani segala jenis bentuk ancaman serta ikut menjaga dan mempromosikan stabilitas keamanan kawasan di wilayah Selat Malaka.

Daftar Pustaka

Buku

- Amitav Acharya dalam L.A. Swatuk, L. d. (2013). *Regional Approaches to Security In The Third World dalam The South at the End of the Twentieth Century dalam Pergeseran KEkuatan di Asia Timur dan Konsekuensi bagi ASEAN; Persepsi Ancaman dan Kerjasama Keamanan Regional. Analisis CSIS*, 343.
- Andrew Cottey, A. F. (2004). *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. New York: Routledge.
- Anggoro, K. (2003). *Angkatan Udara Dan Pertahanan Negara Maritim Indonesia*. Jakarta: Focus Group Discussion Propatria.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Thousand Oaks California: Pustaka Pelajar.
- Shoelhi, M. (2011). *Diplomasi Praktek Komunikasi Internasional*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Prasetyono, E. S. M. (2005). *Intelijen Pertahanan*. dalam A. Widjajanto, *Reformasi Intelijen Negara* (p. 84). Depok: PACIVIS FISIP-UI.
- Fagersten, B. (2012). *Multilateral Intelligence Cooperation: A Theoretical Framework*. In B. Fagersten, *Multilateral Intelligence Cooperation: A Theoretical Framework* (p. 1). US: Kennedy School of Government Harvard University.
- Harald Muller dalam W. Carlsnaes, T. R.-K. (2013). *Security Cooperation dalam Handbook of International Relations dalam Pergeseran KEkuatan di Asia Timur dan Konsekuensi bagi ASEAN; Persepsi Ancaman dan Kerjasama Keamanan Regional. Analisis CSIS; Prospek dan Tantangan Keamanan Regional*, 342.
- Hendropriyono, A. (2013). *Filsafat Intelijen*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Herawati, S. (2009). *Hubungan Antara Kepuasan Kerja Dengan Komitmen Organisasional PNS TNI AL markas Komando Armada RI Kawasan Barat*. Jakarta.
- Kurniawati, D. (2012). *Peran Strategis Kerjasama Intelijen ASEAN Dalam Upaya Pencegahan Serangan Teroris di Indonesia Studi Kasus Kegagalan Intelijen Pada Bom Bali*

- Pertama 12 Oktober 2002. Universitas Indonesia.
- Komariah, D. S. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Lestari, A. (2010). *Strategi Pertahanan Indonesia Di Selat Malaka:Tawaran Proliferation Security Initiative*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, L. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Morgenthau, H. J. (1973). *Politic Among Nations*. New York: Alfred A. Knopf.
- Martono, N. (2015). *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Octavian, A. (2015). *Bajak Laut Antara Aden dan Malaka*. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Parulian Simamora, M. (2013). *Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pedrason, R. (2015). *ASEAN Defense Diplomacy; The Road to Southeast Asian Defense Community*. Dissertation:Heidelberg University.
- Perwita, A. A. (2013). *Pengantar Kajian Strategis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riyanto, T. (2016). *Analisis Kerjasama TNI AL dan Komunitas Pelayaran Niaga Nasional Dalam Menghadapi Ancaman (Sea Armed Robbery) di Selat Singapura*. Universitas Pertahanan. Jawa Barat.
- Salim, M. L. (2013). *Peningkatan Kerjasama Pertahanan Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara Guna Mendukung Diplomasi Pertahanan Dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Kawasan*. Raja Samudera.
- Saronto, Y. W. (2004). *Intelijen Teori, Aplikasi dan Modernisasi*. Jakarta: PT. Ekalaya Saputra.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarno, I. (2011). *Aku Tiada Aku Niscaya: Menyingkap Lapis Kabut Intelijen*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Supriyatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Syawfi, I (2009). *Aktivitas Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Widjanto, A. (2008). *Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004*. Jakarta: Pacivis Universitas Indonesia.

Dokumen

Menhan. (2008). *Buku Putih Pertahanan*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.

Menhan. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.

United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS). (1982).

International Maritime Organization (IMO) Assembly Resolution A. (1025) 26.

Draft Standard Operating Procedures. (2006). *Malacca Straits Patrol. Intelligence Exchange Group*.

Mabes TNI. (2010). *Buku Petunjuk Induk Intelijen TNI*. Jakarta: Mabes TNI.

Waasintel Panglima TNI. (2016). *Laporan Pelaksanaan Pertemuan ke-27 IEG*. Jakarta: Mabes TNI.

Terms of Reference. (2008). *Malacca Straits Patrol. Joint Coordinating Committee*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Jurnal/Artikel

Darmawan, W (2012). *Aliansi Australia dalam ANZUS Treaty (1951)*. Jakarta.

Paparan

Bhakti, I.N. (2016). *Studi Strategi dan Intelijen*. Unhan. Jawa Barat.

Louhenapessy, A. D. (22 November 2016). Wawancara. Mabes TNI. Jakarta.

Dipua, A. (21 November 2016). Wawancara. Koarmabar. Jakarta.

Wiratma. A (1 Desember 2016). Wawancara. Mabes TNI. Jakarta.

Internet

CNN Indonesia. (2015). <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151023180100-20-86949/tni-al-selat-malaka-tak-lagi-berstatus-paling-berbahaya/>. Diakses tanggal 1 Februari 2017.

Diplomatik, D. K. (2011, Oktober 16). Membekali Diplomat Dengan Pengetahuan Intelijen. *Tabloid Diplomasi*.

Riyanta, S. (2015, July 16). *Kerjasama Intelijen Internasional*. Retrieved from jurnalintelijen.net verba volant scripta manent: <http://jurnalintelijen.net/2015/07/06/kerjasama-intelijen-internasional/>, diakses tanggal 10 Agustus 2016

Singapore, Mindef. (2016, April 21). *The Malacca Straits Patrol*. Retrieved from Singapore Government: https://www.mindef.gov.sg/imindex/press_room/official_releases/nr/2

016/apr/21apr16_nr/21apr15_fs.html
, diakses tanggal 21 Agustus 2016
Munawar. (2016).
<http://www.antarasumut.com/berit>

a/156375/kriminalitas-di-selat-
malaka-menurun. Diakses tanggal 5
Februari 2017.